

## **EVALUASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) DI SMP NEGERI 4 SANGGAU**

Oleh:

**HENI MARLINI**  
NIM. E01112097

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun .2016

*Email: [heni\\_marlini@yahoo.co.id](mailto:heni_marlini@yahoo.co.id)*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Sanggau dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dalam upaya menilai keberhasilan program, peneliti menggunakan teori William Dunn dengan 2 indikator evaluasi kebijakan, yakni: efektivitas dan responsivitas. Untuk melihat efektivitas kebijakan, peneliti juga menggunakan ukuran efektivitas dari Gibson yang meliputi: kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana serta sistem pengawasan dan pengendalian. Peneliti juga menggunakan indikator responsivitas dari Dwiyanto yang meliputi: keluhan dari pengguna jasa, sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan pengguna jasa, penggunaan keluhan sebagai referensi perbaikan kedepan dan tindakan aparat birokrasi untuk memberi kepuasan terhadap pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 4 Sanggau belum berjalan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari penemuan data di lapangan yang memperlihatkan bahwa masih banyak siswa miskin yang tidak mendapatkan dana BSM, yaitu pada tahun 2015 hanya terdapat 2 dari 47 (4%) siswa miskin yang mendapat BSM, bahkan siswa dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pun masih ada yang tidak mendapatkan dana bantuan ini, serta diketahui bahwa pelaksanaan program BSM ternyata tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat dalam buku pedoman pelaksanaan, sosialisasi program serta pengawasan terhadap penggunaan dana belum dilakukan secara maksimal. Pihak sekolah tidak pernah menginfokan secara langsung kepada siswa maupun orang tua siswa terkait adanya program BSM, dan pengawasan hanya dilakukan dengan cara menanyakan kepada siswa yang bersangkutan mengenai penggunaan dana yang telah disalurkan. Dari indikator responsivitas dinilai masih kurang, implementor program BSM hanya menerima setiap keluhan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program BSM, namun tidak ada tindak lanjut dari implementor terkait keluhan yang mereka terima. Saran yang dapat peneliti berikan khususnya kepada pelaksana maupun kelompok sasaran dari program BSM adalah perlu adanya usaha implementor agar SMP Negeri 4 Sanggau mendapat penambahan kuota BSM, serta perlu dibuatnya aturan-aturan serta sanksi dalam mengatur hak dan kewajiban siswa miskin penerima BSM agar tidak terjadi pelanggaran. Perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dan dinas pendidikan dalam melakukan sosialisasi dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan program BSM, dan harus ditekankan kembali kepada pihak implementor agar melaksanakan program BSM mengikuti SOP yang terdapat dalam buku pedoman pelaksanaan BSM dan yang terakhir pihak implementor juga harus menindaklanjuti setiap keluhan dari kelompok sasaran, karena setiap masukan dan keluhan tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam peyempurnaan program BSM kedepannya.

Kata-kata Kunci : Evaluasi Kebijakan/Program, Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

## EVALUATION OF DISADVANTAGED STUDENT AID (BSM) PROGRAM AT STATE JUNIOR HIGH SCHOOL (SMP NEGERI) 4 SANGGAU

### Abstract

This research aims to evaluate the success of the Disadvantaged Student Aid (BSM) Program at the State Junior High School (SMP Negeri) 4 Sanggau by using descriptive and qualitative approach. In an effort to evaluate the success of the program, this research uses the theory of William Dunn with two policy evaluation indicators, i.e., the effectiveness and responsiveness. To see the effectiveness of the policy, the research also used the effectiveness of Gibson which includes: clear objectives to achieve, clear strategic goal achievement, preparing the right program, availability of infrastructure and system of supervision and control. This research also used an indicator of the responsiveness by Dwiyanto which covers: complaints from service users, attitude of the bureaucrats in responding to complaints of service users, use of complaints as a reference for corrective action, and bureaucratic apparatus that provides satisfaction to the service users. The results shows that the Disadvantaged Student Aid (BSM) program at the State Junior High School (SMP Negeri) 4 Sanggau did not run effectively. This can be seen from the discovery of the field data that show there are still many disadvantaged student who did not receive funding from BSM, and in 2015 only 2 out of 47 (4%) of poor students who received BSM fund, even some Social Security Cardholders did not receive the aid, and the implementation of the BSM program was not in accordance with the Standard Operating Procedures in the guidebook of implementation, dissemination and supervision of the program. The school has yet to provide information to students and parents related to the BSM program, and supervision is only conducted by asking students about the use of the funds. The indicator of responsiveness shows a poor result as the BSM program implementer only receives complaints about community dissatisfaction with the BSM program implementation but no follow-up from the implementer. Suggestions given in particular to the implementer and the target group of the BSM program are there is a need for SMP Negeri 4 Sanggau to get a quota increase of the BSM, and for rules and sanctions governing the rights and obligations of the BSM recipients in order to avoid irregularities. There is also a need for cooperation between the school and education authorities to socialize and supervise the program implementation. The BSM program implementer should also follow the Standard Operating Procedures contained in the guidebook, and finally the BSM implementer must follow-up on any complaints from the target group, for each input and the complaint can as a reference for future improvement of the BSM program.

*Keywords : Policy/Program Evaluation, Disadvantaged Student Aid Program (BSM)*

### A. PENDAHULUAN

Menjadi bangsa yang maju dan sejahtera merupakan tujuan didirikannya bangsa Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Keinginan bangsa ini untuk dapat maju dan berkembang menjadi suatu bangsa yang mampu bersaing secara global dalam segala bidang tentunya hanya dapat dicapai dengan cara meningkatkan kualitas sumber

daya manusianya, yakni melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dikatakan berhasil apabila dapat mencetak manusia yang terampil dan berakhlak mulia untuk dapat menyelenggarakan keberlangsungan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Meskipun sudah merdeka lebih dari setengah abad, akan tetapi mutu pendidikan Indonesia dapat dikatakan masih rendah dan

memprihatinkan. Berdasarkan data *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) 2015, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan, yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (*Pendidikan Dasar Untuk Semua, dikutip dari berita satu.com*).

Salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah di Indonesia adalah mahalanya biaya pendidikan yang dibebankan kepada setiap peserta didik. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor penghambat dalam memperoleh layanan pendidikan. Sangat disayangkan jika anak-anak dari keluarga kurang mampu harus berhenti sekolah hanya dikarenakan keterbatasan biaya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dimana dalam pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian dipasal 3 ayat 1 poin c menjelaskan bahwa biaya pendidikan meliputi biaya pribadi peserta didik. Itu artinya pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membantu pendanaan biaya pribadi peserta didik. Berdasarkan peraturan tersebut, dalam rangka pemerataan pendidikan khususnya

memberikan kesempatan kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat tetap bersekolah, maka sejak tahun 2008 pemerintah memberikan bantuan melalui program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung Program Pendidikan Sembilan Tahun (bahkan hingga menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah. Sumber dana bantuan ini adalah dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Penerima dana BSM yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah siswa miskin pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta yang telah memenuhi kriteria sesuai pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari pengamatan yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 4 Sanggau, diketahui bahwa masih terdapat berbagai hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaannya di SMP Negeri 4 Sanggau. Hambatan atau permasalahan tersebut adalah pertama masih ada siswa dari keluarga miskin yang tidak mendapat dana BSM yaitu, pada tahun 2013 hanya terdapat 42% siswa miskin yang mendapatkan dana ini, di tahun 2014 meningkat menjadi 52% dan di tahun 2015 menurun menjadi 4% saja siswa miskin di SMP Negeri 4 Sanggau yang menerima manfaat dana bantuan ini. Kedua, adanya ketidaksesuaian pelaksanaan BSM di SMP Negeri 4 Sanggau dengan ketentuan pelaksanaan dalam buku pedoman, yaitu dalam hal penetapan kuota penerima dari dinas ke tiap satuan pendidikan serta pihak implementor yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam buku pedoman pelaksanaan BSM. Ketiga adalah dana BSM yang telah disalurkan tidak digunakan oleh siswa penerima dengan semestinya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Evaluasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 4 Sanggau” dan memfokuskan penelitian ini pada pada “Evaluasi Program

Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 4 Sanggau pada tahun 2013-2015”. Dan berdasarkan indikasi masalah dan fokus penelitian diatas maka penulis merumuskan masalah, yaitu : “Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 4 Sanggau tahun 2013-2015?”

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah atau sektor terhadap suatu masalah (Wahab, 2002:13). Kemudian Hogwood dan Gunn (dalam Suharto, 2011:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Sedangkan Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2013:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:139) menyatakan bahwa

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Setelah kebijakan atau program diimplementasikan kegiatan penting berikutnya adalah melakukan evaluasi. Menurut Yunanda (2009:181) evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Thomas Dye (dalam Parson, 2005:547) "Evaluasi Kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai". Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn (dalam Agustino, 2014:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Menurut Cronbach dan Stufflebeam yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2009:5), evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan bahwa:

#### 1. Efektivitas

2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Selanjutnya secara sederhana penulis mendeskripsikan teori yang dikemukakan oleh William Dunn terhadap permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah kebijakan atau program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Sanggau sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan.
2. Efisiensi, berkenaan dengan seberapa besar usaha yang dilakukan oleh pihak implementor dalam melaksanakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 4 Sanggau.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat memecahkan masalah siswa miskin yang ada di SMP Negeri 4 Sanggau.
4. Perataan, berkenaan pada pertanyaan apakah manfaat dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di distribusikan kepada siswa miskin yang berbeda di SMP Negeri 4 Sanggau.
5. Responsivitas, berkenaan pada pertanyaan apakah program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat memenuhi

kebutuhan semua siswa miskin yang ada di SMP Negeri 4 Sanggau.

6. Ketepatan, berkenaan pada apakah program Bantuan Siswa Miskin (BSM) benar-benar berguna atau bermanfaat di SMP Negeri 4 Sanggau.

Evaluasi program Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan penilaian terhadap suatu proses atau rangkaian kegiatan pelaksanaan program BSM, melihat apakah program BSM di SMP Negeri 4 Sanggau sudah berjalan dengan baik atau belum, dan menilai apakah hasil yang telah dicapai sesuai dengan target yang direncanakan/ditetapkan, maka dari itu peneliti menggunakan 2 kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn, yaitu: efektifitas dan responsivitas. Kedua kriteria evaluasi William Dunn tersebut dipilih dengan alasan bahwa kriteria-kriteria ini dirasakan sesuai, lebih tepat dan lebih mampu menjelaskan beberapa permasalahan yang terjadi dalam Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 4 Kabupaten Sanggau seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah.

Dua kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi Program BSM di SMP Negeri 4 Sanggau tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. William N. Dunn (2003:429), menyatakan bahwa "Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan". Pada dasarnya, efektivitas merupakan penilaian terhadap seberapa jauh alternative yang telah dipilih dan dijalankan dapat mencapai hasil dan tujuan seperti yang diharapkan.

Suatu kebijakan telah dilaksanakan namun ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, maka bisa dikatakan kebijakan tersebut tidak berhasil. Tetapi ada juga hasil dari suatu kebijakan yang efektif dalam jangka panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama.

Kemudian Mahmudi (2005:92), mengartikan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Selain itu menurut Edi Siswadi (2012 : 86), mengartikan bahwa:

*“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.*

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas, maka efektivitas ini diartikan sebagai suatu standar dalam menilai terpenuhinya tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Selain itu, efektivitas juga menunjukkan sejauh mana organisasi, program/kegiatan atau kebijakan tersebut terlaksana sesuai fungsi-fungsinya secara optimal. Berikut kriteria atau ukuran efektivitas menurut Gibson (dalam Kurniawan, 2005:28), yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya implementor dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan kebijakan atau program dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah

ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan kebijakan atau program.

- c) Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
- d) Tersediannya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.
- e) Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan suatu organisasi dapat tercapai.

## **2) Responsivitas**

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn, responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).

Kriteria responsivitas merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kebijakan atau program yang diimplementasikan tersebut dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan kelompok prioritas atau kelompok masyarakat tertentu yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan atau program yang bersangkutan.

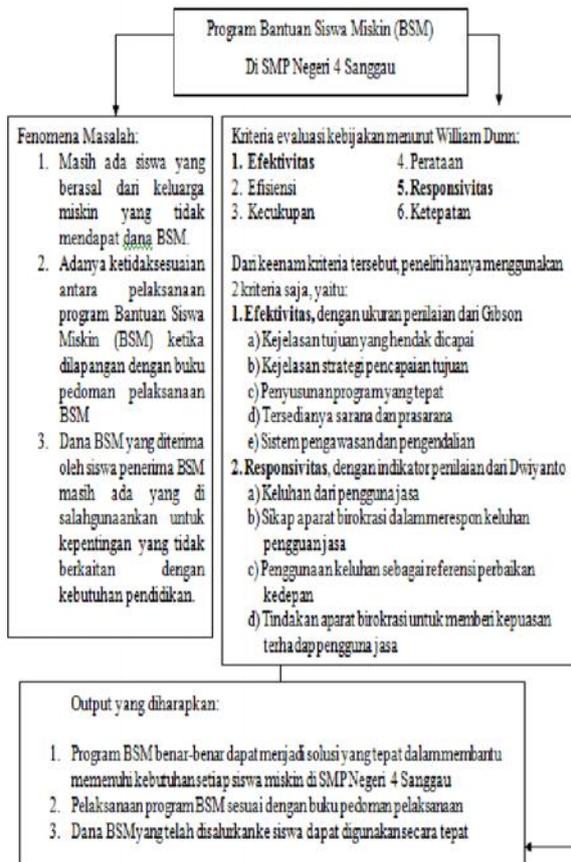
Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa “Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria responsivitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengevaluasi sebuah kebijakan atau program, karena dari kriteria inilah kita dapat melihat apakah kelompok sasaran memberi respon yang baik terhadap

kebijakan atau program tersebut atau tidak, serta melihat apakah kebijakan atau program yang dijalankan dapat memberi kepuasan pada kelompok-kelompok sasaran atau tidak.

Dwiyanto (2012:63), memberikan pandangannya mengenai indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur konsep responsivitas, yakni sebagai berikut:

- 1) Terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama satu tahun terakhir
- 2) Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa
- 3) Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang
- 4) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa.

## KERANGKA PIKIR PENELITIAN



## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam mengkaji evaluasi program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 4 Sanggau adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan objek dan subjek dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemui pada saat penelitian. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Craswell (dalam Komariah &

Satori, 2007:5), merupakan pendekatan yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan metode penelitian ini peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami serta mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai hasil pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 4 Sanggau.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas

#### a) Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Setiap kebijakan atau program harus dibuat dengan tujuan yang jelas, dan pihak implementor juga wajib memahami dengan baik tujuan dari apa yang akan mereka kerjakan. Sama halnya dengan program BSM di SMP Negeri 4 sanggau, seperti yang telah dijelaskan dilatar belakang masalah bahwa program ini merupakan program bantuan yang dikhususkan bagi siswa miskin yang bertujuan untuk mengurangi hambatan siswa miskin dalam memperoleh pendidikan dengan cara memberi bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan personal siswa dalam proses pembelajaran. Dari penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa implementor di tingkat Dinas

Pendidikan dan SMP Negeri 4 Sanggau telah mengetahui dan memahami dengan baik tujuan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Selain itu, kelompok penerima bantuan (siswa miskin) juga telah mengetahui tujuan pemberian dana bantuan ini, meskipun begitu masih saja ada siswa yang menggunakan dana yang telah disalurkan tidak sesuai dengan tujuan dari program. Berbeda dengan kelompok masyarakat miskin yang tidak menerima BSM, mereka justru tidak mengetahui sama sekali mengenai adanya program bantuan yang dikhususkan bagi siswa dari keluarga miskin ini. Kejelasan mengenai suatu kebijakan dan tujuan dari kebijakan tersebut harusnya diketahui dan dipahami tidak hanya oleh pihak implementor saja, tetapi harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat juga, terlebih kepada masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.

#### **b) Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan**

Dalam menjalankan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), strategi atau ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan program ini sudah dibuat dalam buku pedoman pelaksanaan BSM, buku pedoman pelaksanaan ini juga merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan program BSM. Pelaksana BSM di SMP

Negeri 4 Sanggau mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki buku pedoman pelaksanaan BSM, mereka melaksanakan BSM hanya berdasarkan pada surat edaran yang diberikan oleh dinas pendidikan, hal ini menyebabkan masih ditemukannya ketidaksesuaian pelaksanaan BSM di SMP Negeri 4 Sanggau dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, yakni dalam hal perekomendasi calon siswa penerima BSM. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman implementor terhadap ketentuan kebijakan atau program yang sedang mereka kerjakan menyebabkan tidak terlaksananya program atau kebijakan tersebut sesuai dengan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu strategi yang harus dilakukan agar tujuan dari program BSM dapat tercapai adalah dengan cara mengadakan sosialisasi program. Sosialisasi program BSM yang dilakukan oleh sekolah dapat dikatakan masih kurang, hal ini dilihat dari kurangnya pengetahuan orangtua siswa miskin mengenai adanya program BSM. Masih ditemukan orang tua siswa yang tidak tahu sama sekali tentang program bantuan ini, padahal mereka memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang digunakan sebagai syarat utama pengajuan BSM.

### c) Penyusunan Program yang Tepat

Sebuah program/kebijakan akan terlaksana dengan efektif apabila kebijakan itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang dibuat telah bermuatan hal-hal yang memang dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Program BSM merupakan salah satu solusi guna mencegah siswa dari keluarga miskin agar tidak mengalami putus sekolah. Program ini memberi bantuan secara langsung kepada setiap siswa yang terdaftar sebagai siswa penerima BSM. Dana ini diberikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa secara personal. Program BSM sudah tepat dikeluarkan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah dibidang pendidikan. Hadirnya program BSM menjadi solusi bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menikmati pendidikan tanpa diberatkan oleh biaya pendidikan secara personal.

### d) Tersedianya Sarana dan Prasarana

Keefektivan suatu kebijakan juga tergantung pada tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan dari kebijakan tersebut, karena tanpa sarana dan prasarana penunjang, maka kebijakan yang ada akan sulit untuk

dijalankan. Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan BSM di SMP Negeri 4 Sanggau dapat dikatakan mencukupi dan telah tersedia.

### e) Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kebijakan/program. Jika pengawasan dilakukan dengan baik, maka sudah pasti kebijakan/program tersebut dikerjakan dengan baik dan dapat mencapai apa yang menjadi harapan ketika sebuah program dirumuskan. Dalam melaksanakan program BSM, pihak SMP Negeri 4 Sanggau melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan ke siswa penerima, pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar program BSM dapat memberi manfaat bagi siswa dari keluarga miskin. Namun kenyataannya pengawasan yang sekolah lakukan ternyata belum cukup untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan dana BSM. Selain pihak sekolah, pengawasan juga seharusnya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten. Namun pada kenyataannya pihak implementor BSM tingkat Kabupaten Sanggau ini tidak ada melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BSM yang telah diterima oleh siswa, karena dinas merasa bahwa pengawasan tersebut merupakan

wewenang sekolah masing-masing. Padahal dalam buku pedoman pelaksanaan BSM dikatakan bahwa salah satu tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten adalah melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap penggunaan dana BSM pasca dana tersebut disalurkan ke siswa.

## **2. Responsivitas**

### **a) Keluhan Dari Pengguna Jasa**

Kebijakan dibuat oleh pemerintah dan ditujukan kepada masyarakat yang akan menjadi kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan dibutuhkan respon dan keluhan dari kelompok sasaran sebagai salah satu kriteria penilaian atas kebijakan yang dilaksanakan. Dari respon dan keluhan masyarakat tersebut akan diketahui apakah kebijakan yang diimplementasikan dapat memberi kepuasan pada kelompok sasaran atau tidak. Jika dalam evaluasi tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara harapan dan hasil, maka hasil evaluasi yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan atau dalam pembuatan kebijakan yang baru kedepannya. Kelompok sasaran dari program BSM di SMP Negeri 4 Sanggau sangat merespon dengan baik adanya program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Namun, mereka merasa program ini belum dapat memuaskan apa yang menjadi kebutuhan mereka.kecilnya dana BSM yang diterima oleh setiap siswa dirasakan sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan pendidikan selama satu tahun. Hal ini menjadi bukti bahwa program BSM belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan dari kelompok sasaran.

### **b) Sikap Aparat Birokrasi Dalam Merespon Keluhan Pengguna Jasa**

Keluhan dari pengguna jasa atau kelompok sasaran kebijakan merupakan respon yang mereka berikan atas pelaksanaan sebuah kebijakan. Dari keluhan tersebut dapat diketahui apakah kebijakan yang telah dijalankan dapat memuaskan kelompok sasaran atau tidak. Pihak pelaksana BSM di SMP Negeri 4 Sanggau menerima setiap keluhan dari siswa ataupun orang tua siswa terhadap pelaksanaan program BSM, namun respon yang diberikan atas keluhan tersebut dirasa kurang sesuai dengan harapan dari penyampai keluhan, karena pihak sekolah terkesan pasrah dengan kekurangan dari program BSM.

### **c) Penggunaan Keluhan Sebagai Referensi**

#### **Perbaikan Kedepan**

Keluhan yang diterima oleh implementor dapat digunakan untuk

menilai sejauh mana kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan atau mendekati target serta mampu memuaskan kelompok sasaran. Evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses yang sengaja dilakukan agar dapat melihat setiap kekurangan dari kebijakan yang telah diimplementasikan, ini dilakukan agar kekurangan atau ketidakpuasan dari kelompok sasaran dapat dijadikan sebagai referensi dalam memperbaiki kebijakan tersebut untuk kedepannya. Keluhan yang diterima oleh SMP Negeri 4 Sanggau dan juga pihak Dinas Pendidikan selaku implementor BSM ditempat ini tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan BSM kedepannya. *Complain* yang sekolah terima tidak disampaikan kepada pihak dinas, begitu juga dengan *complain* yang pihak Dinas Pendidikan terima dari kelompok sasaran BSM maupun sekolah-sekolah lain tidak disampaikan pula kepada pihak pelaksana BSM di tingkat pusat. Kedua pihak implementor ini bersikap apatis terhadap keluhan yang disampaikan oleh kelompok sasaran, karena mereka kurang memahami bahwa *complain* tersebut dapat digunakan untuk perbaikan program kedepannya.

**d) Tindakan Aparat Birokrasi Untuk Memberi Kepuasan Terhadap Pengguna Jasa**

Program BSM belum bisa menjangkau seluruh siswa miskin yang ada di SMP Negeri 4 Sanggau. Salah satu kenyataan yang terjadi di sekolah tersebut dapat menjadi gambaran mengenai sejauh mana program BSM mampu membantu siswa miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya sesuai dengan tujuan dari program BSM itu sendiri. Sejahtera ini sudah ada usaha yang dilakukan oleh implementor BSM agar program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan ini, yaitu dengan kerjasama antar pihak dinas pendidikan dan sekolah dalam pendataan siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan ini, namun usaha tersebut dinilai belum dilakukan secara maksimal sehingga masih ditemukan siswa dari keluarga pemegang KPS yang tidak terdaftar sebagai penerima BSM.

**E. KESIMPULAN**

Efektivitas program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dinilai dari aspek:

**1. Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai**

Tujuan yang hendak dicapai dari program BSM sudah dipahami oleh pihak dinas pendidikan Kabupaten Sanggau dan

SMP Negeri 4 Sanggau selaku implementor program, namun disisi lain isi dan tujuan dari program ini tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran (siswa dari keluarga miskin) yang tidak terdaftar sebagai penerima BSM. Sedangkan siswa penerima BSM telah mengetahui tujuan dari program ini, namun mereka masih saja menyalahgunakan dana yang diberikan oleh pemerintah melalui program BSM.

## **2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan**

Ketentuan-ketentuan dalam buku pedoman tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan program BSM. Dari penelitian yang penulis lakukan, ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai antar pelaksanaan BSM oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau dan SMP Negeri 4 Sanggau dengan ketentuan dalam buku pedoman pelaksanaan BSM. Ketidaksiuaian tersebut antara lain; pihak Dinas Pendidikan tidak menetapkan kuota BSM ke tiap satuan pendidikan termasuk SMP Negeri 4 Sanggau, Dinas Pendidikan tidak terlibat secara langsung dalam pengawasan penggunaan dana BSM yang telah disalurkan ke siswa dan sekolah tidak memiliki buku pedoman pelaksanaan BSM. Selain itu, sosialisasi program BSM

belum dilakukan dengan baik, karena program ini tidak diketahui dengan jelas oleh kelompok sasaran. Bahkan siswa dan orang tua siswa miskin tidak tahu sama sekali adanya program ini.

## **3. Penyusunan Program yang Tepat**

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan program yang sudah tepat guna mengatasi permasalahan biaya pendidikan pribadi peserta didik yang selama ini menjadi salah satu penghambat keluarga miskin dalam menikmati pendidikan.

## **4. Tersedianya Sarana dan Prasarana**

Dalam melaksanakan program BSM ini, implementor di dinas pendidikan dan di SMP Negeri 4 Sanggau mengatakan bahwa tidak banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam implementasi program ini dan sejauh ini sarana prasarana tersebut telah tersedia dan dirasakan cukup.

## **5. Sistem Pengawasan dan Pengendalian**

SMP Negeri 4 Sanggau telah melakukan pengawasan dengan cara memberikan pengarahan kepada siswa penerima BSM agar menggunakan dana yang telah diterima dengan semestinya dan secara bertanggungjawab, namun ternyata bentuk pengawasan ini belum dapat

dikatakan tepat, karena masih banyak siswa penerima BSM yang melakukan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana ini. Selain itu, pihak Dinas Pendidikan pun tidak pernah melakukan pengawasan kepada siswa penerima, padahal dalam buku pedoman BSM dikatakan bahwa salah satu tugas Dinas Pendidikan adalah melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana setelah dana BSM disalurkan ke masing-masing siswa.

Responsivitas program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dinilai dari :

### **1. Keluhan Dari Pengguna Jasa**

Pihak implementor BSM, yaitu Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 4 Sanggau sama-sama pernah menerima keluhan berupa kecilnya nominal dana yang diterima siswa penerima setiap tahunnya dan juga keluhan mengenai kuota BSM yang tidak sesuai dengan siswa miskin yang ada pada tiap satuan pendidikan.

### **2. Sikap Aparat Birokrasi Dalam Merespon Keluhan Pengguna Jasa**

Pihak implementor memang menerima setiap keluhan yang ada, namun dari respon yang mereka berikan kepada penyampai *complain*, mereka terkesan pasrah dengan kekurangan program BSM, tidak ada respon yang menunjukkan bahwa mereka akan mengusahakan agar kekurangan program tersebut dapat diatasi.

### **3. Penggunaan Keluhan Sebagai Referensi Perbaikan Kedepan**

Keluhan yang diterima baik oleh SMP Negeri 4 Sanggau maupun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau selaku implementor BSM ditempat ini tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan BSM kedepannya. Keluhan yang sekolah terima tidak diteruskan ke pihak dinas, begitu juga dengan *complain* yang pihak dinas terima, tidak disampaikan ke pelaksana BSM di tingkat pusat. Hal ini membuat pelaksana BSM di tingkat pusat tidak mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan ketidakpuasan atas pelaksanaan BSM di Kabupaten Sanggau, khususnya di SMP Negeri 4 Sanggau sehingga mereka juga sulit mendapatkan informasi untuk penyempurnaan BSM kedepannya.

### **4. Tindakan Aparat Birokrasi Untuk Memberi Kepuasan Terhadap Pengguna Jasa**

Sudah ada usaha yang dilakukan agar program BSM ini dapat mencapai tujuan dan memuaskan kelompok sasaran. Pihak sekolah merekomendasikan semua siswa miskin yang ada disekolah tersebut dan pihak dinas meminta agar tiap sekolah mendata siswa miskin yang benar-benar membutuhkan dan melengkapi juga setiap syarat administrasi pengajuan BSM, hal ini dilakukan sebagai upaya agar program

BSM dapat memuaskan kelompok sasaran, namun ternyata usaha tersebut dinilai belum maksimal, karena masih ditemukan siswa miskin bahkan siswa pemegang KPS yang tidak terdata.

## **F. SARAN**

### **1. Efektivitas**

#### **a) Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai**

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan program yang membantu pembiayaan biaya personal pendidikan siswa dari rumah tangga miskin agar tidak mengalami putus sekolah, namun di SMP Negeri 4 Sanggau masih ada siswa penerima BSM yang menyalahgunakan dana BSM yang telah diterima, maka dari itu dirasakan sangat perlu bagi pihak implementor untuk menjelaskan tujuan dari program BSM kepada siswa maupun orang tua siswa penerima BSM, agar tidak ada lagi penggunaan dana BSM yang tidak sesuai dengan tujuan program BSM.

#### **b) Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan**

Diharapkan kepada implementor BSM mulai dari tingkat pusat hingga tingkat satuan pendidikan agar melaksanakan program BSM sesuai SOP yang telah

terdapat dalam buku pedoman pelaksanaan BSM. Termasuk dalam hal penetapan kuota penerima BSM. Selanjutnya, hal yang sangat penting adalah dilakukannya sosialisasi program BSM secara terbuka kepada tiap siswa dan orang tua siswa miskin agar mereka dapat mengetahui dan memenuhi syarat administrasi pengajuan BSM, sehingga tidak ada lagi siswa miskin bahkan siswa dari keluarga pemegang KPS yang tidak terdata oleh sekolah sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan.

#### **c) Penyusunan Program Yang Tepat**

Agar program ini dapat menjadi solusi yang tepat bagi siswa miskin yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan pribadi pendidikannya, maka perlu dipikirkan lagi berkenaan dengan kecilnya jumlah dana yang diterima oleh siswa miskin penerima BSM, karena bagaimana pun juga kecukupan biaya pendidikan akan memberi pengaruh dalam menunjang proses belajar siswa yang bersangkutan.

#### **d) Tersedianya Sarana dan Prasarana**

Meskipun pihak implementor program BSM baik dari Dinas Pendidikan maupun SMP Negeri 4 Sanggau mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah tersedia dengan baik, namun dari penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksana di SMP Negeri 4 Sanggau justru tidak

memiliki buku pedoman pelaksanaan BSM, maka dari itu diharapkan kedepannya pelaksana BSM di tiap tingkatan harus memiliki dan memahami pedoman BSM, serta kuantitas dari sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ini juga harus diperhatikan, karena penulis menilai bahwa sumber daya manusia dalam melaksanakan BSM tergolong sangat sedikit, hanya ada 1 orang yang mengurus pelaksanaan program ini baik di Dinas Pendidikan maupun di SMP Negeri 4 Sanggau, kondisi ini membuat pelaksana merasa sangat terbatas dalam melaksanakan program ini secara maksimal.

#### **e) Sistem Pengawasan dan Pengendalian**

Pihak SMP Negeri 4 Sanggau memang telah melakukan pengawasan, namun pengawasan yang dilakukan belum dapat dikatakan maksimal karena masih tetap ada siswa yang menyalahgunakan penggunaan dana BSM, maka dari itu diperlukan kerjasama antar Dinas Pendidikan dan sekolah dalam melakukan pengawasan serta berikan sanksi kepada siswa yang ketahuan menyalahgunakan dana BSM. Selain itu, penulis juga merasa sangat perlu bagi pihak implementor untuk menyalurkan dana BSM secara berkala kepada siswa penerima agar dana tersebut

tidak langsung dihabiskan dan dapat digunakan dengan semestinya.

## **2. Responsivitas**

### **a) Keluhan dari Pengguna Jasa**

Keluhan dari pengguna jasa merupakan respon dari kelompok sasaran atas pelaksanaan sebuah kebijakan atau program, dari respon tersebut dapat diketahui apakah program yang telah dijalankan dapat memecahkan masalah yang ada dimasyarakat atau tidak. Maka dari itu pihak implementor dirasa sangat perlu melakukan sosialisasi program dan meminta kepada kelompok sasaran agar memberikan respon atau tanggapan terhadap program yang dijalankan pemerintah untuk mereka.

### **b) Sikap Aparat Birokrasi dalam Merespon Keluhan**

Setiap keluhan yang diterima oleh pihak implementor harus direspon dengan baik dan pihak implementor juga harus menindaklanjuti keluhan tersebut.

### **c) Penggunaan Keluhan Sebagai Referensi Perbaikan Kedepan**

Keluhan dari kelompok sasaran yang diterima oleh pihak sekolah harus dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Sanggau, dan keluhan dari Dinas Pendidikan Sanggau juga harus diteruskan kepada pelaksana BSM ditingkat pusat, dan

keluhan-keluhan ini harus menjadi pertimbangan untuk memperbaiki program BSM kedepannya.

#### **d) Tindakan Aparat Birokrasi Untuk Memberi Kepuasan Terhadap Pengguna Jasa**

Pelaksana BSM ditingkat Kabupaten khususnya Dinas Pendidikan meminta kepada Kementerian Pendidikan yang berwewang dalam penetapan kuota, untuk menambahkan kuota BSM bagi Kabupaten Sanggau dengan menjelaskan kondisi ekonomi dan segala pertimbangan mengenai kebutuhan masyarakat akan program BSM ini. Selain itu dari segi nominal dana yang diterima, pihak pelaksana juga dapat menyampaikan ketidakpuasan kelompok sasaran terhadap jumlah dana yang mereka terima kepada Kementerian Pendidikan selaku implementor BSM ditingkat pusat.

### **G. DAFTAR PUSTAKA**

#### **1. Buku :**

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi., Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara

Dunn, William.N. 2005. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Dwiyanto Agus. 2012. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan public*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Parson, Wayne. 2005. *Public Policy*. Jakarta : Prenda Media Group

Siswadi, Edi. 2012. *Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Efektif dan Prima*. Bandung : Mutiara Press.

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Yunanda, M. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Balai Pustaka Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin

#### **2. Dokumen Negara :**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

#### **3. Internet :**

<http://www.unicef.org/indonesia/id/ducation.html> diakses pada tanggal 9 November 2015



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HENI MARLINI  
 NIM / Periode lulus : E01112097 / IV  
 Tanggal Lulus : 13 Juni 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 E-mail address/ HP : heni\_marlini@yahoo.co.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada Program Studi ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

EVALUASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) DI SMP  
 NEGERI 4 SANGGAU

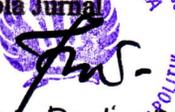
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal  
  
 Dr. H. Pardi M. AB  
 NIP. 197209052002121003

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 21 September 2016  
  
 HENI MARLINI  
 NIM. E01112097

**Catatan :**

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)